

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dunia saat ini menghadapi tantangan global dengan berbagai isu perubahan iklim. Sebanyak 193 Negara di dunia melakukan kesepakatan global untuk menghadapi isu tersebut melalui pengesahan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Tema yang diusung adalah "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". SDGs berisi 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang merupakan rencana aksi global untuk lima belas tahun ke depan yaitu dimulai dari tahun 2016 hingga 2030. Hal ini berguna untuk melindungi lingkungan, mengurangi kesenjangan, dan mengakhiri kemiskinan. SDGs berlaku untuk semua negara (*universal*), sehingga semua negara secara moral wajib untuk mencapai tujuan dan target SDGs.

Pemerintah Indonesia merupakan negara yang ikut berpartisipasi dalam agenda global tersebut dalam melindungi lingkungan. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang kelautan dan kemaritiman. Mengingat Indonesia memiliki wilayah maritim yang luas, pemerintah turut serta menegakkan kebijakan-kebijakan global tersebut. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 3 butir a menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan ciri nusantara dan maritim. Laut Indonesia menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain bidang kelautan dan kemaritiman juga dalam bidang ekosistem daratan, sesuai dengan tujuan SDGs ke -14 dan ke -15 yaitu pemanfaatan dan perlindungan terhadap ekosistem laut dan daratan secara berkelanjutan.

Keanekaragaman hayati harus dilindungi agar tidak terjadi kepunahan atau kerusakan dan berakhir hilang. Aktivitas masyarakat berupa perburuan, fragmentasi habitat, pemanfaatan berlebihan, perdagangan ilegal dapat mengancam keberlangsungan hidup dari keanekaragaman hayati tersebut. Hal ini

semakin parah dengan adanya permintaan akan kebutuhan tumbuhan dan hewan untuk dikonsumsi, dipelihara, digunakan untuk obat dan kebutuhan lainnya dengan melakukan perburuan dan perdagangan ilegal (Santoso, 2008). Diperlukan bentuk perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati tersebut dalam sebuah konservasi pelestarian alam seperti yang tertulis pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan adalah dengan mendirikan taman nasional yang didefinisikan sebagai kawasan ekosistem asli yang dilestarikan dan pengelolaannya dilakukan melalui sistem zonasi yang bertujuan untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan sebagai penunjang budidaya, rekreasi serta pariwisata (UU RI, 1990). Salah satu taman nasional di Indonesia yang memiliki ekosistem laut dan darat adalah Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ). Taman Nasional Karimunjawa memiliki lima tipe ekosistem yaitu ekosistem terumbu karang, ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, ekosistem hutan pantai, ekosistem padang lamun dan rumput laut serta ekosistem hutan mangrove. Taman Nasional Karimunjawa merupakan Taman Nasional satu-satunya di Jawa Tengah dengan berbagai ekosistem yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Namun upaya pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut tidak berjalan lancar. Hal tersebut karena adanya ancaman, tekanan dan gangguan yang masih terjadi di kawasan konservasi. Terutama gangguan dari aktivitas manusia yang berada di sekitar Kawasan Taman Nasional. Gangguan tersebut dapat merusak ekosistem yang ada dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem karena berkurangnya peranan atau fungsi masing-masing ekosistem.

Gangguan berupa penebangan liar merupakan salah satu penyebab berkurangnya luas hutan mangrove selain karena faktor alam. Pada tahun 1992 dilihat menggunakan citra satelit, hutan mangrove Karimunjawa mempunyai luas 473,94 ha kemudian pada tahun 2017 luasnya menurun menjadi 391,57 ha (Latifah *et al.*, 2018). Penelitian lain mengungkapkan bahwa kegiatan manusia merupakan penyebab degradasi hutan mangrove di seluruh dunia (Eddy *et al.*,

2016). Padahal hutan mangrove mempunyai fungsi yang sangat penting terutama untuk kelangsungan makhluk hidup lain.

Gangguan lainnya adalah aktivitas nelayan menangkap ikan menggunakan potasium dan jaring cantrang (Pemerintah Kabupaten Jepara, 2016; Idris, 2021). Penggunaan peralatan pengambilan ikan yang tidak ramah terhadap lingkungan tersebut dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang. Selain itu, terdapat kapal berukuran besar yang bersandar di daerah perairan Karimunjawa (Kristiawan, 2018) yang juga dapat membuat rusak terumbu karang. Kejadian ini berakibat pada banyaknya terumbu karang yang pecah dan mati di perairan beberapa pulau (Yusidarta and Atmojo, 2018; Munasik *et al.*, 2020). Hasil survei transek (penampang) komposisi kerusakan terumbu karang pada lokasi yang terkena kapal tongkang di Pulau Tengah dan Pulau Cilik yaitu jenis karang keras (*acropora* dan *non-acropora*), *dead scleractinia*, ganggang serta abiotik (Tempo.co, 2017). Di Pulau Tengah terjadi kerusakan terumbu karang seluas 1.420,32 m<sup>2</sup> dan di Pulau Cilik seluas 267,22 m<sup>2</sup>. (Munasik *et al.*, 2020). Selain itu di Pulau Gosong Seloka juga dilakukan pengukuran dengan teknik *drone-ground-truth measurement* yang menghasilkan terdeteksinya kerusakan terumbu karang di Gosong Seloka akibat kandasnya kapal seluas 184,45 m<sup>2</sup> (Yusidarta and Atmojo, 2018).

Pengembangan pariwisata memiliki andil dalam kerusakan terumbu karang di Karimunjawa. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan pariwisata di Taman Nasional Karimunjawa belum berkelanjutan (Qodriyatun, 2019). Peneliti lain juga berpendapat bahwa pariwisata memiliki dampak menurunnya luasan terumbu karang, selain karena faktor alam (Laksono and Mussadun, 2014; Limbong and Soetomo, 2014; Irawan, Sasmito and Suprayogi, 2017; Farid, Purnomo and Supriharyono, 2018; Pribadi, Suryanti and A'in, 2020). Sehingga yang banyak dijumpai di tempat *snorkeling* adalah kerusakan koloni karang berupa kematian koloni secara parsial, cabang yang patah dan permukaan koloni karang yang terkikis (Biondi, Munasik and Koesoemadji, 2014; Priyanto, 2016; Akhmad, Purnomo and Supriharyono, 2018).

Kerusakan-kerusakan terumbu karang tersebut menyebabkan luas terumbu karang mengalami penurunan. Melalui citra landsat pada tahun 1996 kepulauan Karimunjawa mempunyai luas terumbu karang 7.074.800 m<sup>2</sup> dan pada tahun 2016 luas terumbu karang 5.946.800 m<sup>2</sup>. Penurunan terumbu karang di kepulauan Karimunjawa tahun 1996 sampai dengan 2016 sebesar 15,94% atau sama dengan luas 1.128.000 m<sup>2</sup> dari 7.074.800 m<sup>2</sup> (Irawan, Sasmito and Suprayogi, 2017). Penyebab utama rusaknya ekosistem terumbu karang ada dua yaitu faktor alam dan faktor antropogenik atau aktivitas manusia. Kerusakan terumbu karang akibat faktor antropogenik berdampak lebih parah dan permanen. Selain itu kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh faktor antropogenik dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung (Uar, Murti and Hadisusanto, 2016). Sehingga Taman Nasional Karimunjawa baru-baru ini menempati peringkat ketiga teratas taman laut yang terancam di Indonesia, dengan terumbu karangnya mendapat skor tinggi karena tekanan lokal (Kennedy *et al.*, 2020).

Gangguan lainnya adalah pelanggaran terhadap batas wilayah pemanfaatan atau zona (Tampubolon and Satria, 2013) oleh nelayan, pencurian hasil hutan, pengambilan satwa liar yang dilindungi, perambahan kawasan hutan dan perubahan lanskap kawasan Taman Nasional Karimunjawa (BTNKJ, 2019). Kejadian ini sangat disayangkan karena kerusakan alam yang terjadi dapat pulih dalam waktu lama. Apabila gangguan-gangguan yang terjadi tidak dapat ditangani, maka kerusakan ekosistem semakin parah dan dapat menimbulkan bencana. Gangguan-gangguan tersebut harus diminimalisir agar kerusakan yang terjadi di Taman Nasional berkurang. Sehingga diperlukan suatu penelitian yang mampu menganalisis pengamanan dan perlindungan di Taman Nasional Karimunjawa. Diharapkan dari penelitian ini mampu menghasilkan rekomendasi yang diperlukan untuk mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi permasalahan yang ada di Taman Nasional Karimunjawa, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Taman Nasional Karimunjawa merupakan kawasan konservasi dengan ekosistem-

ekosistem yang harus dilindungi, namun masih terdapat gangguan-gangguan yang dapat merusak ekosistem. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengamanan dan perlindungan di Taman Nasional Karimunjawa belum optimal, sehingga penulis membuat pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana hubungan antar faktor yang mempengaruhi pengamanan dan perlindungan di Taman Nasional Karimunjawa?
2. Bagaimana sistem pengamanan dan perlindungan di Taman Nasional Karimunjawa?
3. Bagaimana langkah perbaikan pengamanan dan perlindungan yang tepat di Taman Nasional Karimunjawa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pengamanan dan perlindungan kawasan Taman Nasional Karimunjawa ini adalah :

1. Menganalisis hubungan antar faktor yang mempengaruhi pengamanan dan perlindungan Taman Nasional Karimunjawa dengan metode SEM;
2. Menganalisis sistem pengamanan dan perlindungan kawasan Taman Nasional Karimunjawa dengan metode SEM;
3. Menentukan langkah perbaikan pengamanan dan perlindungan yang tepat di Taman Nasional Karimunjawa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya konsep teori ilmu lingkungan mengenai pengamanan dan perlindungan kawasan Taman Nasional. Selain itu juga diharapkan menjadi bahan atau dasar pengembangan ilmu lingkungan khususnya terkait pengamanan dan perlindungan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan menambah wawasan aktivis dan praktisi di lapangan dalam menjalankan

pengamanan dan perlindungan kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Dengan bertambahnya wawasan aktivis dan praktisi di lapangan, diharapkan proses pengamanan dan perlindungan dapat berjalan secara optimal dan efektif.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan untuk mendapatkan penjelasan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian lainnya dengan membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu untuk menunjukkan bahwa penelitian ini bukan duplikasi dan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, berikut dipaparkan tema penelitian sebelumnya, sehingga terlihat perbedaannya dengan penelitian ini.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

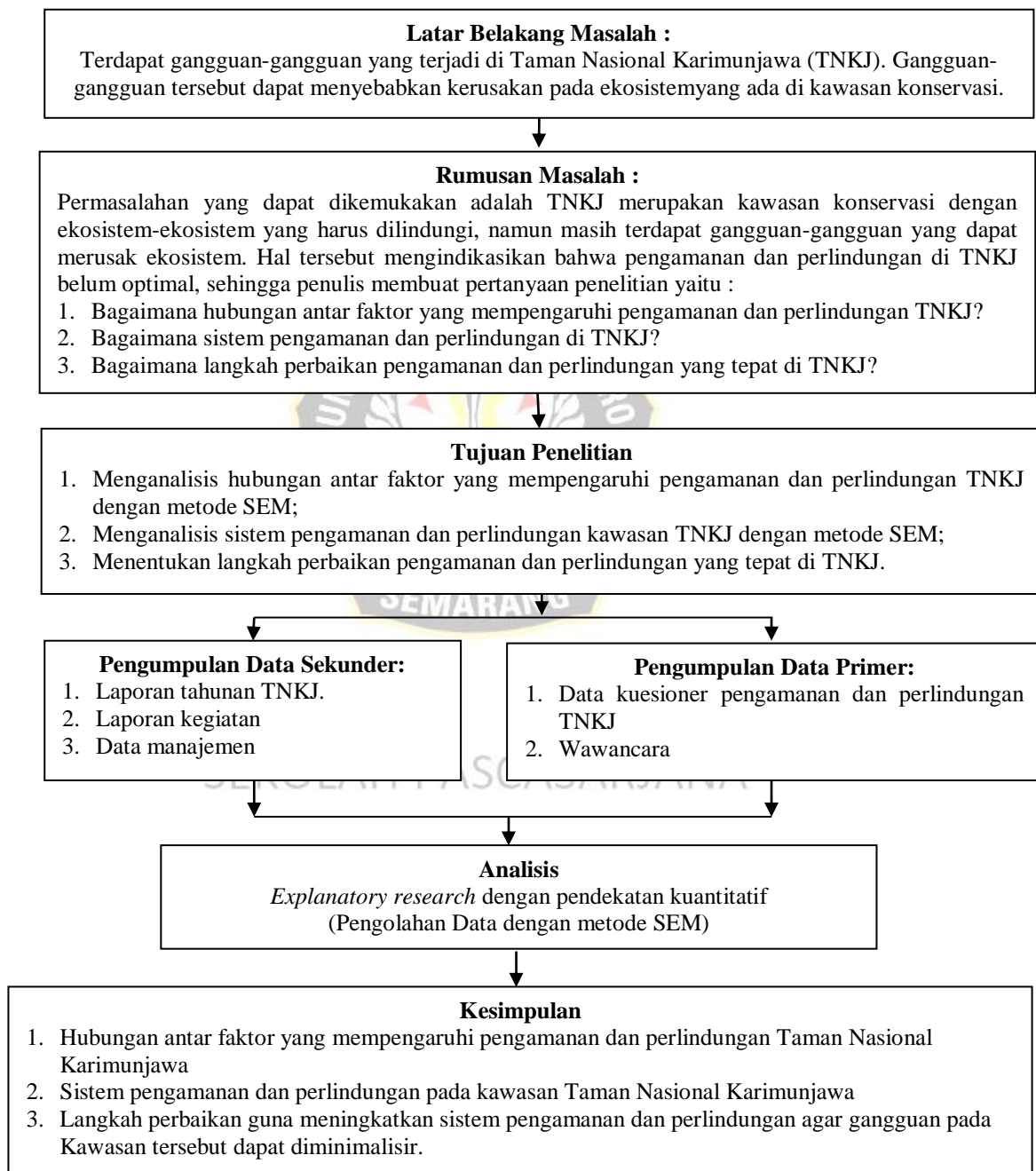
No	Judul Penulis	Metode	Fokus/Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan Penelitian
1	Kinerja Pengamanan Taman Nasional Berbasis Resort (Kasus Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Alas Purwo)  Bambang Hari Trimarsito, Tesis MPKKH IPB	Analisis data dilakukan secara deskriptif, dan menggunakan instrumen analisis hubungan, serta analisis perbandingan	Hasil penelitian adalah mendeskripsikan sumber daya pengamanan tiap resort, mendeskripsikan keamanan kawasan dari segi tingkat gangguan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengamanan dan menghitung efisiensi tiap resort yang berada di tiga taman nasional (Trimarsito, 2010).	Selain pengamanan penulis membahas tentang perlindungan kawasan Taman Nasional Karimunjawa dengan metode <i>Structural Equation Modeling</i>
2	Penanganan Perambahan Hutan di Taman Nasional Bukit	Penelitian non-doktrinal, bersifat	Penelitian berfokus untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak	Penulis menggunakan <i>explanatory research</i> dengan

No	Judul Penulis	Metode	Fokus/Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan Penelitian
	<p>Barisan Selatan (Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Perambahan Hutan)</p> <p>Sadatin Misry, Tesis MIH UNS</p>	<p>deskriptif berbentuk penelitian diagnostik yang bersifat deskriptif</p>	<p>efektifnya penanganan perambahan hutan dan untuk mengetahui upaya yang sebenarnya harus dilakukan dalam penanganan perambahan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Misry, 2010).</p>	<p>pendekatan kuantitatif, selain membahas hubungan antar faktor dan langkah perbaikan yang tepat untuk pengamanan dan perlindungan, juga dibahas tentang sistem pengamanan dan perlindungan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa</p>
3	<p>Efektivitas Kinerja Polisi Kehutanan dalam Penanganan Gangguan Kawasan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango</p> <p>Medi Haerullah, Tesis MIPH IPB</p>	<p>Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan analisis SWOT.</p>	<p>Penelitian berfokus pada mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kinerja polhut dalam menangani gangguan kawasan, mengukur efektivitas kinerja polisi kehutanan dalam menangani gangguan kawasan dan membuat rumusan strategi untuk meningkatkan kinerja polhut (Haerullah, 2018).</p>	<p>Penulis menggunakan metode <i>Structural Equation Modeling</i> menganalisis hubungan antar faktor-faktor yang mempengaruhi pengamanan dan perlindungan, serta langkah perbaikan yang tepat dalam pengamanan dan perlindungan di Taman Nasional Karimunjawa</p>

Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian pengamanan dan perlindungan kawasan Taman Nasional Karimunjawa yaitu

perbedaan lokasi penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan dan alat analisis yang digunakan.

## 1.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran